

## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian analisis framing relokasi kawasan Pasar Ngasem dalam Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja periode Maret-Mei 2010. Pertama akan dideskripsikan peristiwa relokasi Pasar Ngasem yang terjadi. Kedua adalah deskripsi mengenai berita relokasi Pasar Ngasem pada SKH Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja. Terakhir adalah gambaran umum mengenai kedua SKH tersebut. Gambaran umum kedua SKH tersebut diperoleh berdasarkan sumber *company profile* masing-masing SKH.

#### A. RELOKASI KAWASAN PASAR NGASEM

Pasar Ngasem berada di kawasan Taman Sari Jogja, Sekitar tahun 1960, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar penjual burung yang tersebar di beberapa tempat di Yogyakarta pindah ke Pasar Ngasem yang berlokasi dekat dengan objek wisata Tamansari, dengan adanya kebijakan tersebut tak heran jika Ngasem menjadi pusat penjualan jenis burung, hewan peliharaan, sekaligus beragam kebutuhan pokok lainnya. Kendati bercampur dengan pedagang kebutuhan pokok, warga dan wisatawan terlanjur mengenal Pasar Ngasem sebagai pasar burung.

Tidak hanya dikenal sebagai pasar burung saja, namun Pasar Ngasem juga sudah menjadi salah satu daya tarik wisata yang merupakan bagian dari kawasan petilasan Tamansari. Letak Pasar Ngasem yang berhimpitan dengan Tamansari memberikan keuntungan tersendiri bagi pasar ini, tak hanya penggemar burung banyak juga turis yang

menyempatkan diri untuk sekedar mampir atau melihat-lihat Pasar Ngasem sebelum mereka mengunjungi Tamansari.

Namun, pada tahun 2002 isu relokasi Pasar Ngasem mulai muncul dan pihak PEMKOT Yogyakarta sudah beberapa kali melakukan survei untuk relokasi Pasar Ngasem, namun baru tanggal 22 April 2010 rencana relokasi tersebut dilaksanakan. Alasan PEMKOT Yogyakarta untuk melakukan relokasi Pasar Ngasem karena lokasi Pasar Ngasem yang lama akan dikembangkan menjadi pasar tradisional dan pasar cinderamata yang terintegrasi dengan kawasan wisata Tamansari dan menurut PEMKOT kawasan Pasar Ngasem sudah terlalu kumuh.

Sebanyak 237 pedagang burung dan hewan dari Pasar Ngasem yang sudah berjualan sejak tahun 1960-an pada tanggal 22 April 2010 secara resmi berpindah dan menempati lokasi baru di PASTHY, Dongkelan. PASTHY memiliki luas total 15.605 meter persegi atau tujuh kali lebih luas dari Pasar Ngasem. Pasar ini terletak di Jalan Bantul Km1 dan bisa menampung lebih dari 350 pedagang,

Pasar Ngasem yang berada di kawasan Taman Sari Jogja itu telah direlokasi ke daerah Dongkelan guna pemugaran Taman Sari. Rencana pemindahan ini menuai berbagai pro kontra dikalangan para pedagang di Ngasem. Meskipun terbilang 'sukses' merelokasi ratusan para pedagang burung di Ngasem, namun sebagian pedagang menilai pemindahan lokasi Pasar Ngasem ke daerah Dongkelan itu kurang efektif dan justru malah merugikan para pedagang. Mereka yang sebagian kurang setuju juga beranggapan jika lokasi di Dongkelan tersebut kurang strategis untuk menarik perhatian para wisatawan, baik domestik maupun wisatawan mancanegara, karena lokasi Dongkelan

jauh dari kompleks wisata di Jogja. Tidak sedikit yang beranggapan lokasi Pasar Ngasem sekarang ini sudah sangat strategis.

Ketika terjadi pro kontra dikalangan para pedagang di Ngasem terjadi, muncullah berita tentang sejarah Pasar Ngasem. Menurut salah satu versi sejarah Pasar Ngasem yang didokumentasikan dalam bentuk foto di situs Tembi, Ngasem sudah menjadi tempat pasar burung sejak 1809. Ngasem atau pasar burung telah berusia tua, lebih dari 100 tahun. Pasar Ngasem sekarang memang kelihatan sudah bersih setidaknya dibanding beberapa puluh tahun yang lalu, namun ada yang nyaris tidak berubah darinya yakni “pasar burung”. Tentu, Pasar Ngasem tahun 1809 dengan Pasar Ngasem sekarang sudah mengalami banyak perubahan baik secara fisik maupun dari segi variasi burung atau bintang yang dijual disana.

Burung telah lama menjadi salah satu hobi dan lambang keberadaan seseorang dalam adat Jawa. Bahkan memiliki burung sebagai perlambang hobi telah disejajarkan dengan kepemilikan kuda sebagai alat transportasi, keris sebagai alat pertahanan, wisma sebagai rumah dan wanita sebagai lambang kehidupan dan penghidupan. Kebutuhan akan burung inilah yang agaknya menjadi sebab utama didirikannya Pasar Ngasem. Letaknya yang masih di dalam lingkup Keraton, tepatnya sekitar 400 meter di sebelah barat dari Kraton Jogja, memudahkan para priyayi pada masanya untuk dapat membeli burung di pasar ini.

## **B. BERITA RELOKASI PASAR NGASEM**

Surat kabar adalah salah satu media massa yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Salah satu kelebihan surat kabar dibandingkan media massa lainnya adalah informasi yang disajikan terdokumentasi. Masyarakat dapat

membaca berita kapanpun selama mereka masih memiliki surat kabar. Masyarakat tidak perlu terbatas pada waktu ketika membaca surat kabar, tidak seperti siaran berita di televisi yang disiarkan pada jam tertentu. Jika seseorang melewatkan siaran berita di televisi tersebut maka tidak akan lagi menemukan informasi yang sejenis jika siaran berita tersebut tidak ditayangkan ulang.

Dalam permasalahan relokasi Pasar Ngasem ini media massa lokal seperti SKH Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja merupakan media yang efektif untuk masyarakat Yogyakarta untuk mengikuti perkembangannya. Kedua surat kabar tersebut merupakan surat kabar lokal yang mempunyai peran sangat besar dalam menyebarkan berita-berita lokal kepada masyarakat Yogyakarta. Dalam penyampaian berita relokasi Pasar Ngasem kepada masyarakat, kedua media tersebut mempunyai sikap masing-masing terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Sikap tersebut tergambar dalam berita-berita yang dimuatnya.

Selama bulan Maret-Mei 2010 kedua media tersebut menampilkan beragam bentuk berita tentang perkembangan relokasi Pasar Ngasem. Sangat memungkinkan dalam satu hari kedua media tersebut menampilkan satu atau dua berita tentang relokasi Pasar Ngasem dengan bentuk berita yang bisa jadi berbeda. Dalam penelitian jika terdapat dua berita dalam satu hari maka berita yang lebih diprioritaskan untuk diteliti adalah berita langsung (*straight news*) karena yang disajikan dalam berita langsung sifatnya aktual, hangat dan menyampaikan suatu realitas penting yang secepatnya perlu diketahui oleh khalayak. Berita langsung memuat unsur-unsur terpenting dari peristiwa tersebut yang harus sesegera mungkin disampaikan kepada khalayak.

## C. DESKRIPSI MEDIA

### C.1. Kedaulatan Rakyat

Berdasarkan keputusan Panitia Hari Bersejarah DIY, diakui bahwa Kedaulatan Rakyat merupakan harian nasional pertama di DIY. Kedaulatan Rakyat (KR) lahir pada pasca revolusi kemerdekaan RI, yaitu pada Kamis *Kliwon*, 27 September 1945, KR memiliki izin yakni SIUPP No.12/SK/MENPEN/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.

Sekitar tahun 1930-an yaitu pada masa kolonial Belanda, di Yogyakarta satu-satunya koran yang dapat dibaca dan menjadi hiburan masyarakat adalah Sedyatama. Koran ini berbahasa Jawa dengan menggunakan huruf latin dan terbit sore hari. Koran ini diterbitkan oleh gerakan pemuda dan pejuang. Sedyatama dicetak oleh penerbit Mardi Moelja. Direksi penerbitan dijabat oleh R.Rudjito, pemimpin redaksi dipercayakan pada Bramono yang kemudian diganti oleh Brotosusastro dan selanjutnya Darusalam.

Selain memimpin Sedyatama, Bramono juga mengelola mingguan Swara Tama. Disamping itu, Bramono masih menerbitkan mingguan berbahasa Jawa, yakni Merapi. Pada masa pendudukan Jepang yakni sekitar tahun 1942, barisan propaganda Jepang membiarkan Sedyatama terbit, namun dengan syarat harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena terus menerus ditekan, penerbit Sedyatama dihentikan. Waktu itu kantor Sedyatama di Jalan Malioboro. Kantor Sedyatama kemudian dirampok Jepang dan digunakan sebagai kantor penerbitan koran Jepang yang dikemudian diberi nama Sinar Matahari.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan di Jakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VII menyatakan Yogyakarta sebagai

bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dengan bantuan Sri Sultan, pada 6 September 1945 masyarakat Yogyakarta mampu merebut kekuasaan sipil Jepang.

Di tengah situasi genting seperti itu, harian Sinar Matahari yang sebagian besar dimotori pejuang-pejuang pers bekas Sedyatama seperti Soemantoro, Bramono, Moeljono, Samawi, Soeprijo Djojosupadmo, Djoemadi, Boerhan, Moehammad Noer, Drijodipurwo, dan sejumlah tokoh lainnya berupaya terus terbit. Namun terbitannya tidak lagi berorientasi pada propaganda dan kepentingan Jepang. Tanpa disadari oleh Jepang, berita yang dimuat justru merupakan informasi penting bagi para pejuang Republik Indonesia. Berita-berita yang menggelorakan perjuangan digemakan.

Berita-berita yang digemakan dan dikembangkan Sinar Matahari itu mengundang ketidaksenangan Jepang yang waktu itu kekuatan fisik Jepang masih utuh di Yogyakarta. Salah satu upaya agar Sinar Matahari tidak dimanfaatkan Jepang adalah dengan cara kantor Sinar Matahari disegel oleh Komite Nasional Indonesia (KNI). Penyegekan kantor Sinar Matahari dibantu oleh Samawai. Waktu itu Samawi dan Soemantoro termasuk anggota KNI Yogyakarta.

Akibat dari penyegekan ini, masyarakat Yogyakarta tidak mendapat informasi tertulis yang memadai mengenai situasi dunia dan keadaan dalam negeri. Maka timbullah tekad Samawi dan kawan-kawan untuk segera menerbitkan koran baru. Dengan bantuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, segel Sinar Matahari dibuka.

Setelah segel Sinar Matahari dibuka, dilakukan persiapan penerbitan pengganti Sinar Matahari. Pada 26 September 1945, *lay out* surat kabar telah dikerjakan. Begitu juga segala bahan berita yang akan dimuat sudah disiapkan. Semua telah lengkap, kecuali

nama untuk surat kabar yang baru. Karena belum menemukan nama yang cocok, akhirnya ada yang mengusulkan agar namanya dimintakan saja kepada pengurus KNI.

Samawi dan Soemantoro menemui ketua KNI Mr. Soedarisman Poewoekoesoemo. Setelah sedikit berbincang dan berfikir sejenak, Mr. Soedarisman Poewoekoesoemo tersenyum lalu memberi nama “Kedaulatan Rakyat”. Keesokan harinya, Kamis *Kliwon* 27 September 1945, setelah empat puluh hari proklamasi dikumandangkan dan setelah para pejuang berhasil menguasai tanah air dan kekuasaan Jepang, lahirlah harian Kedaulatan Rakyat.

Nama Kedaulatan Rakyat kemudian dikenal dengan istilah KR, merupakan surat kabar harian di Indonesia. Menurut Mr. Soedarisma Poewoekoesoemo, KR merupakan koran pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka. Penerbitan tahun pertama memuat berita utama mengenai “Kekuasaan Pemerintah daerah Djogjakarta” dengan dicetak 3000 hingga 4000 dan semua habis terjual. Namun sekarang tiras Kedaulatan Rakyat per harinya berjumlah sekitar 110.000 eksemplar. Logo KR pun masih dengan menggunakan huruf kapital tegak. Pada akhir tahun 1947 mulai menggunakan logo dengan huruf kursif dan ejaan lama. Logo tersebut dicipta dalam suasana perjuangan. Tahun 1972 disesuaikan dengan seiring dengan berlakunya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Dalam dinamika perjuangan yang begitu tinggi itulah, KR hadir sebagai penyaji informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. KR berusaha untuk tetap eksis. Selama tahun 1945-1948 KR tidak hanya bergulat dengan bangsa Indonesia, tapi juga dengan dirinya sendiri. Situasi yang ada, baik ekstern maupun intern menjadikan KR untuk sementara waktu mengalihkan perjuangan dari penyaji informasi berwujud koran yang hadir secara setia kepada pembaca ke pendukung perjuangan fisik bangsanya yang sedang berperang

melawan penjajah dalam bentuk selebaran. Sejak tahun 1950 KR mengarah ke profesionalisasi usaha dengan upaya mencari keuntungan meskipun demikian bukan berarti sifat perjuangannya ditinggalkan dan ditanggalkan.

Berdasarkan motto KR “Amanah Hati Nurani Rakyat”, menunjukkan bahwa KR membawa amanat rakyat yang mewakili suara hati nurani rakyat. Selain itu KR juga meningkatkan pengetahuan rakyat dan menyampaikan informasi kepada rakyat. Kebijakan redaksional di KR adalah independen yaitu tidak memihak pada salah satu pihak. Disarankan bagi para reporter atau wartawan dalam menuliskan berita mampu seimbang. Tidak dengan memihak pada salah satu narasumber saja.

Dalam SKH Kedaulatan Rakyat ada kebijakan khusus dari redaksi dalam melakukan pemberitaan semua peristiwa, kebijakan tersebut adalah tulisan harus bisa dipertanggung jawabkan, narasumber jelas, tidak menyudutkan orang lain dan berita harus berimbang. Adapula kebijakan di SKH Kedaulatan Rakyat yang dalam istilah Jawa nya “*ngono yo ngono neng ojo ngono*”, memberitakan sesuatu dengan cara yang halus, berimbang dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

## **C.2. Harian Jogja**

Halaman depan media kit harian Jogja yang diterbitkan pada tahun 2008 menyebutkan jika Harian Jogja merupakan koran generasi baru yang ingin menyajikan isinya sejalan dengan semangat Yogyakarta. Berita ditampilkan secara santun dengan menghormati narasumber dan juga pembaca. Sama halnya orang Yogyakarta, yang secara santun, senang memberikan petunjuk kepada yang bertanya (diwujudkan dengan ciri khas ikonnya Pakde harjo yang menunjukkan ibu jari sebagai tanda penghormatan).



Sebagai Koran terkini, Harian Jogja juga mengakomodasi kebutuhan pembaca generasi terkini. Memadukan kebutuhan terkini dengan nilai tradisi Yogyakarta sebagai acuannya, menjadikan koran ini begitu cepat diterima orang Yogyakarta. Mereka menyapa akrab koran ini dengan panggilan Harjo. Harian Jogja tidak lahir begitu saja menjadi salah satu Koran lokal di Yogyakarta, namun kelahirannya tak terlepas dari Bisnis Indonesia. Perjalanan panjang Bisnis Indonesia yang akhirnya melahirkan Harian Jogja.

Visi Harian Jogja adalah mengawal dinamika dan nilai luhur budaya masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Sedangkan misinya untuk memberikan pilihan bagi komunitas Yogyakarta yang makin majemuk, memacu semangat masyarakat untuk membangun wilayah secara mandiri, menyebarkan romantisme ke-Jogja-an bagi warga yang pernah memiliki keterpautan dengan wilayah ini, dan meningkatkan daya kritis masyarakat untuk mencapai cita-cita menuju bangsa yang cerdas (data dari kantor Harian Jogja)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Jogja, A. Bayu Widagdo mengenai sejarah Harian Jogja, pada November 2007 dibentuklah tim studi dari pusat (Bisnis Indonesia) yang mempunyai tugas untuk mengkaji apakah masih layak atau tidak di daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk didirikan surat kabar baru. DIY dipilih karena tingkat kesenangan membaca di kota ini termasuk tinggi karena dikenal sebagai kota pelajar. Ternyata hasil dari kajian itu menyimpulkan bahwa di DIY masih layak untuk didirikan surat kabar baru

Pada bulan Februari-Maret 2008, untuk meyakinkan hasil survei sebelumnya, diadakan lagi survei dilakukan oleh kalangan akademisi yaitu mahasiswa dari UGM dan

UII. Dari hasil survei itu ternyata masyarakat Yogyakarta masih membutuhkan media alternatif lain dibandingkan dengan media yang sudah ada pada waktu itu. Media yang lebih bermutu, sesuai keinginan masyarakat terutama isinya yang lokal tentang Yogyakarta.

Dari situlah akhirnya diputuskan untuk didirikan sebuah surat kabar lokal baru di Yogyakarta. Maka diterjukanlah YA.Sunyoto yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan redaksi Monitor Depok, A.Bayu Widagdo dan Aditya Noviardi (sebelumnya redaktur dan asisten redaktur Bisnis Indonesia). Satu lagi merupakan redaktur dari Solo Pos, mereka inilah yang akhirnya menahkodai keredaksian Harian Jogja. Untuk nama pertengahan April 2008, atas gagasan YA Sunyoto dan A.Bayu Widagdo, ada dua nama yang akan disepakati untuk menemani Koran baru ini, yaitu Koran Jogja dan Gema Jogja dan dipilihlah Koran Jogja. Namun tak disangka sebelum terbit perdana, pada 28 April 2008 di Jakarta terbitlah Koran Jakarta. Untuk mengantisipasi jika masyarakat mengira masih dalam satu perusahaan atau mengacaukan *branding* , maka disepakatilah nama yang baru yaitu Harian Jogja.

Akhirnya Maret 2008 dimulailah perekrutan karyawan, termasuk pula redaktur dan repoter. Pada minggu ke III-IV masih di bulan yang sama, dilakukan pelatihan bagi redaktur dan reporter di Kaliurang. Terjaringlah 24 reporter hampir semua reporter dan Harian Jogja merupakan orang-orang yang baru dalam bidang media. Banyak diantaranya yang tidak mempunyai dasar dari jurnalistik, maka pada 1Mei-20Mei 2008 redaktur dan reporter melakukan praktek *trial and error* sebagai ajang untuk belajar dan mengoreksi meminimalisir kesalahan. Selama itu juga hasil dari tulisan tidak diterbitkan.

Harian Jogja kemudian diterbitkan perdana pada tanggal 20 Mei 2008. Sengaja dipilih tanggal itu karena bersamaan dengan hari Kebangkitan Nasional. *Launching* pertama dilakukan di Kepatihan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Selain dihasilkan Harian Jogja sendiri, isi dari berita Harian Jogja sebagian merupakan hasil konvergensi dengan JBBI (Jaringan Berita Bisnis Indonesia) dan Solo Pos. Konvergensi yaitu mengambil data (berita) tanpa membayar. Jadi, Harian Jogja bebas mengambil berita apa saja dari JBBI (Jaringan Berita Bisnis Indonesia), karena Harian Jogja juga merupakan grup JBBI (Jaringan Berita Bisnis Indonesia). Banyak manfaat dari konvergensi ini, efisiensi biaya, tenaga dan waktu. Sebagai contoh reporter Harian Jogja tidak harus bersusah-susah mencari berita bisnis di Jakarta, karena bisa memanfaatkan konvergensi dari Bisnis Indonesia. Berita tentang Solo pun bisa diambil melalui konvergensi dengan Solo Pos hal ini bisa dilakukan karena mereka satu grup.